

## DAFTAR PUSTAKA

- Arinta, Kustadi. 1996. *Pengantar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bachtiar, Arif dkk. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Baswir, Revrison. 2005. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta : BPF
- H.M. Nuh Fadillah dan Muhtar. 2004. *Proses Penyusunan Anggaran dan Pengalokasian Belanja di Pemda Kabupaten Wonogiri*. Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia. Vol 19 No.1: 27-56.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Mahsun, Mohammad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPF
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*, Andi: Yogyakarta.
- Nataluddin. 2001. *Potensi Dana Perimbangan Daerah pada Pemerintah Daerah di Propinsi Jambi*. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Nirzawan. 2001. *Tinjauan Umum Terhadap Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara*. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Prasetyo, Andi. 2011. *Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Dilihat Dari Rasio Pendapatan Daerah Pada APBD 2006-2008*. Skripsi S1 FE-UMS, tidak dipublikasi.
- Setyawan, Setu. 2003. *Pengukuran Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang dilihat dari Perspektif Akuntabilitas*, Balance, Vol. 1, No 1, FE UMM.
- Soeratno dan Yunasman. 2002. *Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Solok*. Kajian Bisnis No 26 : 47-53.

- Sularmi dan Agus Endro Suwarno. 2006. *Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Otonomi Daerah Ditinjau Aspek Keuangan*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol 5 No. 1: 28-50.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*.
- Widodo. 2001. *Analisa Rasio Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah*. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Widyawati, Lina. 2006. *Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Magetan*. Skripsi S1 FE-UMS, tidak dipublikasi.
- Wirawan Setiaji dan Priyo Hari Adi. 2007. *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran?.* SNA X.
- Witono, Banu. 2002. *Akuntansi Sektor Publik dan Akuntabilitas Keuangan Daerah*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol 1 No.1: 12-23.
- Wulandari, Anita. 2001. *Kemampuan Keuangan Daerah Studi Kasus Kota Jambi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. JKAP. Vol 5 No.2: 12-33.
- Yuliati. 2001. *Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Menghadapi Otonomi Daerah*. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP YKPN.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pematang*.